



Pemkot Harus Turun Tangan

Selesaikan Persoalan Penataan Sisi Selatan Stasiun Tugu

JOGJA - Legislatur di DPRD Kota Jogja meminta Pemkot Jogja segera turun tangan menyelesaikan persoalan penataan sisi selatan Stasiun Tugu Jogja. Hal itu seiring dengan terbitnya surat peringatan (SP) pertama 5 Juni lalu dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada para pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu Jogja tersebut.

Yang menjadi persoalan, sekitar 80 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa tersebut selama ini mengantongi kartu bukti pedagang (KBP) yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Pasar, yang sekarang menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja. Hingga bulan ini, para pedagang juga mengaku masih membayar retribusi.

"Harusnya Pemkot Jogja bertanggung jawab melindungi

pedagang resmi saat ada persoalan, seperti dengan PT KAI ini," ujar Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko saat menerima perwakilan Paguyuban Manunggal Karsa kemarin (12/6).

Koko, sapaannya, menambahkan, tahun lalu sebenarnya DPRD Kota Jogja sudah pernah memfasilitasi pertemuan pedagang dengan PT KAI Daop 6 maupun dengan Pemkot Jogja.

Tapi, setelah pertemuan tersebut Koko mengaku belum pernah diajak berembuk kembali hingga keluarnya surat peringatan pertama atau SP 1 dari PT KAI. "Kami akan surati PT KAI supaya SP itu tidak diteruskan sebelum ada pertemuan lagi dengan eksekutif," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri juga menilai SP 1 yang dilayangkan PT KAI ke pedagang tersebut salah alamat, karena seharusnya ditujukan ke Disperindag Kota Jogja. "Karena pedagang ini resmi di bawah Disperindag Kota Jogja harusnya suratnya ke sana," katanya.

Nasrul juga meminta terkait alas hak yang merupakan Sultan Ground juga perlu ditelusuri. "Perlu dicek dulu, KAI mengklaim dapat kekancingan, padahal sebelumnya dimanfaatkan pemkot dan diberikan hak ke pedagang," sambungnya.

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa Rudi Tri Purnama mengatakan, saat memberikan surat tidak pernah langsung tapi melalui pihak ketiga. Hal itu dilainnya sebagai bentuk intimidasi ke pedagang. Rudi juga menegaskan saat ini masih resmi tercatat sebagai pedagang di bawah Disperindag Kota Jogja. "Kalau yang benar harusnya koordinasi dengan disperindag dulu, bukan langsung ke pedagang," tuturnya.

Rudi menambahkan, selama ini PT KAI selalu mengatasnamakan warga RW 03 Sosromenduran Gedongtengen, Jogja yang menginginkan penataan PKL di wilayahnya. Warga di sana diiming-imingi menjadi kampung binaan PT KAI. "Padahal saya ini juga warga RW 03, aslinya di dalamnya jauh lebih kumuh,

malah ada plus-plus," ujarnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 6 Jogja Eko Budianto mengaku malah belum mengetahui SP 1 tersebut. "Bisa jadi dari divisi lain, masing-masing punya tupoksi sendiri," ujarnya.

Terkait dengan masalah pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu Jogja sudah dikoordinasikan dengan Pemkot Jogja. Eko belum mau menjawab terkait dengan relokasi maupun tali asih untuk para pedagang.

Eko hanya menjelaskan, saat ini PT KAI Daop 6 Jogja sedang menyelesaikan pembangunan jalur pedestrian di selatan pintu keluar Stasiun Tugu Jogja, yang akan dijadikan percontohan pembangunan jalur pedestrian di sana.

Jalur pedestrian yang dibuat selebar enam meter. Sedangkan trotoar dibuat di dalam pagar, supaya tidak dimanfaatkan pedagang lagi. "Mudah-mudahan saat lebaran nanti sudah selesai dan bisa dilihat contoh pedestrian yang akan kami buat," ungkapnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005